



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 168/050/2025  
TENTANG  
DAFTAR DATA PRIORITAS TINGKAT KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Daftar Data Prioritas Tingkat Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;  
4. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 67 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG DAFTAR DATA PRIORITAS TINGKAT KOTA PARIAMAN.

KESATU : Daftar Data Prioritas Tingkat Kota Pariaman yang terdiri dari:  
a. indikator kinerja makro Pemerintah Kota Pariaman tahun 2024-2026;  
b. indikator kinerja utama Pemerintah Kota Pariaman tahun 2024-2026;

- c. indikator kinerja daerah Pemerintah Kota Pariaman tahun 2024-2026; dan
  - d. indikator kinerja program Pemerintah Kota Pariaman tahun 2024-2026;
- KEDUA : Indikator kinerja makro Kota Pariaman tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator kinerja utama Kota Pariaman tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Indikator kinerja daerah Kota Pariaman tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Indikator kinerja program Kota Pariaman tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Kriteria Daftar Data Prioritas Tingkat Kota Pariaman sebagai berikut:
  - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Wali Kota dalam Rencana Pembangunan Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan atau
  - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- KETUJUH : Daftar Data Prioritas Tingkat Kota Pariaman dijadikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Vertikal di daerah dan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
- KEDELAPAN : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman dan sumber dana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 15 Mei 2025

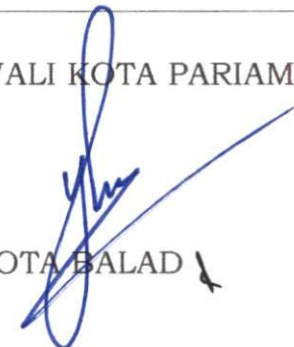
WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 168 /050/2025  
TENTANG  
DAFTAR DATA PRIORITAS TINGKAT  
KOTA PARIAMAN

INDIKATOR KINERJA MAKRO  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024-2026

No	INDIKATOR KINERJA MAKRO
1	Pertumbuhan Ekonomi
2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan per kapita
3	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku per kapita
4	Indeks Gini
5	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)
6	Tingkat Kemiskinan
7	Penduduk Miskin
8	Tingkat pengangguran terbuka
9	Indeks Pembangunan Manusia
	a. Angka Harapan Hidup
	b. Harapan Lama Sekolah
	c. Rata-rata Lama Sekolah
	d. Pengeluaran per Kapita

WALI KOTA PARIAMAN,  
  
YOTA BALAD

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 168 /050/2025  
TENTANG  
DAFTAR DATA PRIORITAS TINGKAT  
KOTA PARIAMAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA	
Tujuan 1 : Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas	
1.	Indeks Pembangunan Manusia
Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing	
1.	Angka Harapan Lama Sekolah
2.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Sasaran 1.2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	
1.	Angka Usia Harapan Hidup
2.	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita
Sasaran 1.3 : Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	
1.	Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan
Sasaran 1.4 : Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
1.	Indeks Pemberdayaan Gender
2.	Indeks Pembangunan Gender
Tujuan 2 : Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat	
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi
2.	<i>Gini Ratio</i> (Indeks Gini)
Sasaran 2.1 : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto	
1.	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto
Sasaran 2.2 : Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto	
1.	Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto

INDIKATOR KINERJA UTAMA	
Sasaran 2.3 : Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata	
1.	Persentase Pertumbuhan <i>spending of money</i>
Sasaran 2.4 : Meningkatnya iklim usaha dan investasi	
1.	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi
Sasaran 2.5 : Menurunnya angka kemiskinan	
1.	Angka Kemiskinan
Sasaran 2.6 : Menurunnya angka pengangguran	
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka
Sasaran 2.7 : Meningkatnya kemandirian Desa	
1.	Indeks Desa Membangun
Tujuan 3 : Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran 3.1 : Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	
1.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota
2.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Sasaran 3.2 : Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.	Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara
Sasaran 3.3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	
1.	Indeks Pelayanan Publik
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat
Tujuan 4 : Terwujudnya Kota Pariaman layak huni	
1.	Indeks Kota Layak Huni ( <i>Liveable City</i> )
Sasaran 4.1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	
1.	Indeks Infrastruktur Daerah
Sasaran 4.2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran 4.3 : Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	
1.	Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni
2.	Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani

INDIKATOR KINERJA UTAMA	
Sasaran 4.4 : Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana	
1.	Indeks Resiko Bencana
Sasaran 4.5 : Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat	
1.	Indeks Ketentraman dan ketertiban

WALI KOTA PARIAMAN, *f*

*AYOTA BALAD d*

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 168/050/2025  
TENTANG  
DAFTAR DATA PRIORITAS TINGKAT  
KOTA PARIAMAN

INDIKATOR KINERJA DAERAH  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA DAERAH	
1	Pertumbuhan PDRB
2	Pengeluaran Perkapita disesuaikan
3	Indeks Gini
4	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan
5	Indeks Pembangunan Manusia
6	Angka rata-rata lama sekolah
7	Angka usia harapan hidup
8	Tingkat pengangguran terbuka
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik
10	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan
11	Opini Badan Pemeriksa Keuangan
12	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan
13	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap Produk Domestik Regional Bruto
14	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto
15	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto
16	Kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto
ASPEK DAYA SAING DAERAH	
1	Angka kriminalitas yang tertangani
2	Rasio ketergantungan
ASPEK PELAYANAN UMUM	
I. Layanan Urusan Wajib Dasar	
1. Pendidikan	
	Angka Partisipasi Kasar
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

INDIKATOR KINERJA DAERAH	
2. Kesehatan	
1	Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk
2	Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
11	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
12	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
13	Persentase orang terduga Tuberkulosis mendapatkan pelayanan Tuberkulosis sesuai standar
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi <i>Human Immunodeficiency Virus</i> mendapatkan pelayanan deteksi dini <i>Human Immunodeficiency Virus</i> sesuai standar
3. Penataan Ruang	
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga seluruh kabupaten/kota
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
6	Rasio kepatuhan Izin Mendirikan Bangunan kab/kota
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi
4. Perumahan dan Permukiman	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

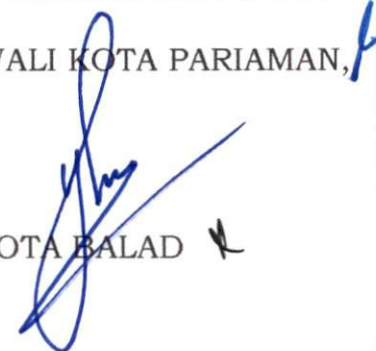
INDIKATOR KINERJA DAERAH	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani
4	Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
2	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
7	Waktu tanggap ( <i>response time</i> ) penanganan kebakaran
6. Sosial	
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator Standar Pelayanan Minimal)
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota
II. Layanan Urusan Wajib Non Dasar	
1. Tenaga Kerja	
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan / Perjanjian Kerja Bersama, Lembaga Kerjasama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)
5	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (per 100.000 penduduk perempuan)
3. Pangan	
1	Persentase kesediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)
4. Pertanian	
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan


INDIKATOR KINERJA DAERAH	
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal
4	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
5	Persentase Tanah Pemerintah Kota yang disertifikatkan
5. Lingkungan Hidup	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2	Persentase sampah perkotaan yang tertangani
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1	Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki Kartu Identitas Anak
3	Kepemilikan Akta Kelahiran
4	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1	Persentase pengentasan desa tertinggal
2	Persentase peningkatan status desa mandiri
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	Laju pertumbuhan penduduk
2	Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern atau <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate</i> )
4	Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)
9. Perhubungan	
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota
10. Komunikasi dan Informatika	
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota
11. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah	
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

INDIKATOR KINERJA DAERAH	
12. Penanaman Modal	
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota
13. Kepemudaan dan Olah Raga	
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
3	Peningkatan prestasi olahraga
14. Statistik	
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
15. Persandian	
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah
16. Kebudayaan	
1	Terlestarikannya Cagar Budaya
17. Perpustakaan	
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
18. Kearsipan	
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
III. Layanan Urusan Pilihan	
1. Pariwisata	
1	Persentase jumlah pertumbuhan wisatawan mancanegara per kebangsaan
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota
3	Tingkat hunian akomodasi
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto harga berlaku
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah
2. Pertanian	
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular

INDIKATOR KINERJA DAERAH	
<b>3. Perdagangan</b>	
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (Izin Usaha Pusat Perbelanjaan / Surat Izin Usaha Perdagangan Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern / Izin Usaha Toko Swalayan / Surat Izin Usaha Perdagangan Toko Swalayan)
2	Prestasi kinerja realisasi pupuk
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku
<b>4. Perindustrian</b>	
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh industri terkait
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh industri terkait
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini
<b>5. Kelautan dan Perikanan</b>	
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data Kementerian Kelautan dan Perikanan)
<b>IV. Penunjang Urusan</b>	
<b>1. Perencanaan Pembangunan</b>	
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>2. Keuangan</b>	
1	Rasio Belanja Pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan
2	Rasio Pendapatan Asli Daerah
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi <i>transfer expenditures</i> )
4	Opini Laporan Keuangan
5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
6	Deviasi realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
7	Manajemen Aset
8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya
<b>3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan</b>	
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (Pegawai Negeri Sipil tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

INDIKATOR KINERJA DAERAH	
2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (Pegawai Negeri Sipil tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (Pegawai Negeri Sipil tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
4. Penelitian dan Pengembangan	
1	Persentase pemanfaatan dokumen penelitian daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan
5. Pengawasan	
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
6. Sekretariat Daerah	
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditangani pada kuartal pertama
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan
7. Sekretariat Dewan	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. Urusan pemerintahan umum	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan
2	% Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

WALI KOTA PARIAMAN, 

YOTA BALAD 

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR /050/2025  
TENTANG  
DAFTAR DATA PRIORITAS TINGKAT  
KOTA PARIAMAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024-2026

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
A	URUSAN WAJIB	
I	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	Urusan Pendidikan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah
2	Program Pengelolaan Pendidikan	a. Persentase Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah dengan nilai kemampuan literasi yang memenuhi kompetensi minimum b. Persentase Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dengan nilai kemampuan literasi yang memenuhi kompetensi minimum c. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini d. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar e. Tingkat partisipasi warga negara usia 7 18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan
3	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi
2	Urusan Kesehatan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah b. Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan
3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar
4	Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alkes di Puskesmas sesuai standar

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pos Pelayanan Terpadu aktif
3	Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah b. Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	a. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi b. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan kab/Kota
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Drainase	Persentase panjang drainase kota dalam kondisi baik
4	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung yang memenuhi syarat teknis
5	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah kawasan strategis yang tertata dan terpelihara
6	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap
7	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	Jumlah Sumber Daya Manusia Penyelenggara jasa kontruksi yang kompetensi
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah dokumen rencana dan regulasi tata ruang yang valid dan akurat
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang berakses sanitasi layak termasuk aman
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	a. persentase penduduk berakses air minum b. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan
11	Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan persampahan
4	Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
2	Program Pengembangan Perumahan	a. Jumlah Dokumen pengembangan perumahan b. Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
3	Program Kawasan Permukiman	a. Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani b. persentase perumahan dan permukiman layak huni (persentase perumahan layak huni)
4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni diluar kawasan permukiman kumuh yang ditangani
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang telah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang ditingkatkan
5	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	
a	Satpol PP	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Persentase kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tertangani b. Persentase gangguan Kententraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	a. Waktu tanggap ( <i>response time</i> ) penanganan kebakaran b. Persentase pelayanan penyelamatan korban kebakaran dan Non Kebakaran
b	Penanggulangan Bencana Daerah	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
2	Program penanggulangan bencana	Persentase Penanggulangan Bencana yang tertangani
6	Urusan Sosial	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan kapasitas bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
3	Program Rehabilitasi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang tertangani
4	Program Pelindungan Jaminan Sosial	Persentase keakuratan data kemiskinan (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
6	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota
II. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1. Urusan Tenaga Kerja		
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai/Mandiri
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja
4	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang melindungi Tenaga Kerja
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan	a. Persentase perempuan yang duduk di legislatif b. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang mendukung program Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender
3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase layanan bagi keluarga dan perlindungan anak
5	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase forum kelembagaan anak yang aktif
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Penyelesaian kasus terhadap anak
3. Urusan Pangan		
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Kemandirian Pangan	Jumlah stok pangan yang tersedia
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat	% Angka Kecukupan Energi
3	Program penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah desa/kelurahan rentan rawan pangan

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
4	Program Pengawasan Keamanan pangan	Persentase Pengawasan Keamanan pangan
4	Urusan Pertanahan	
1	Program Penyelesaian sengketa tanah garapan	Jumlah penyelesaian penanganan masalah tanah pemko
2	Program pengelolaam izin membuka tanah	Persentase pengsertfikatan tanah pemko
5	Urusan Lingkungan Hidup	
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase lingkup dokumen perencanaan bidang lingkungan hidup
2	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	a. Indeks Kualitas Air b. Indeks Kualitas Udara
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Kualitas Lahan
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha pengguna Bahan Berbahaya dan Beracun dan penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang mengelola Bahan Berbahaya dan Beracun dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	persentase Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pengurangan sampah
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup di Kota Pariaman yang ditangani
8	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
2	Program pendaftaran penduduk	a. Persentase Cakupan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik b. Persentase Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak
3	Program Pencatatan sipil	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun
4	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase Perjanjian Kerja Sama Organisasi Perangkat Daerah dan Permintaan Data yang ditindaklanjuti
5	Program pengelolaan profil kependudukan	Persentase ketersediaan data kependudukan dan pencatatan sipil
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
2	Program Penataan Desa	Persentase Penataan Wilayah Desa dan Kewenangan Desa
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase realisasi kerjasama antar desa
3	Program administrasi pemerintahan desa	% Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
4	Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	% Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
8	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
1	Program Pengendalian penduduk	Angka <i>Total Fertility Rate</i>
2	Program Pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (UnmetNeed)
3	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Persentase Kelompok Tribina yang aktif
9	Urusan Perhubungan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Tingkat Pelaksanaan dan Ketersediaan Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Dibutuhkan

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Sarana, Informasi, Koordinasi dan Disiplin Angkutan Penyeberangan
10	Urusan Komunikasi Dan Informatika	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah
		Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
2	Program Informasi dan komunikasi publik	% penyebarluasan informasi dan komunikasi publik
3	Program Aplikasi Informatika	% pengembangan, pengelolaan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan ( <i>Electronic Government</i> )
11	Urusan Koperasi dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah
		Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	% Koperasi Yang mendapatkan pembinaan
3	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro	% Usaha Mikro kecil Yang mendapatkan pembinaan
4	Program Pengembangan UMKM	Jumlah Usaha mikro naik kelas
5	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah koperasi sehat
6	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus koperasi yang mengikuti Pelatihan
12	Urusan Penanaman Modal	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah
		Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
2	Program pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah dokumen potensi investasi daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan
3	Program promosi penanaman modal	Jumlah investor yang berminat
4	Program Pelayanan penanaman modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tepat waktu

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
5	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
6	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Dokumen pengembangan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan dimanfaatkan oleh internal dan eksternal
13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	
1	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif
2	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase sarana prasarana olahraga yang representatif
3	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase fasilitasi yang dilaksanakan terhadap organisasi Kepramukaan
14	Urusan Statistik	
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	a. % ketersediaan data sektoral b. Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
15	Urusan Persandian	
1	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	% Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara dengan Baik
16	Urusan Kebudayaan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
2	Program pengembangan kebudayaan	Persentase budaya lokal (ritual adat dan tradisi) yang dikembangkan menjadi atraksi
3	Program pengembangan kesenian tradisional	Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional Yang Didampingi
4	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase museum Kota Pariaman yang dikelola
17	Urusan Perpustakaan	
1	Program Penunjang Urusan	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
2	Program pembinaan perpustakaan	Jumlah Perpustakaan ber-Standar Nasional Perpustakaan
18	Urusan kearsipan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
2	Program pengelolaan arsip	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku
3	Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Jumlah dokumen/ arsip yang diakuisisi
B.	URUSAN PILIHAN	
1.	Urusan kelautan dan perikanan	
1	Program pengelolaan perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya
2	Program pengelolaan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap
3	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Angka konsumsi ikan
2	Urusan Pariwisata	
1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase sarana dan prasarana pariwisata dalam kondisi baik
2	Program pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata
3	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
4	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pembinaan sumber daya pariwisata yang dilaksanakan
3	Urusan Pertanian	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
2	Program penyediaan	a. Jumlah Produksi Padi

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
	dan pengembangan sarana pertanian	b. Jumlah Produksi Cabai Besar c. Jumlah Produksi Kelapa Dalam d. Jumlah Produksi Daging Sapi
3	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penurunan luasan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan
4	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penurunan kasus penyakit zoonosis
5	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
6	Program penyuluhan pertanian	Jumlah kelompok tani yang naik kelas kemampuan
4	Urusan Perdagangan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
2	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase pemantauan stabilisasi harga barang pokok dan barang penting lainnya
3	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen
4	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Jumlah kerjasama perdagangan
5	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase sarana prasarana pasar/ perdagangan dalam kondisi baik
5	Urusan Perindustrian	
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	a. Jumlah ketersediaan Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota Pariaman b. Persentase Kesesuaian Pembangunan Industri Kota Pariaman
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah industri yang memiliki Izin Usaha Industri
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SiINAS)	Jumlah pelaku industri yang terdata dalam aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
C	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH	
1.	Unsur Sekretariat Daerah	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	a. Persentase Kualitas Pengelolaan Harmonisasi Kebijakan dan Penyelesaian Masalah Hukum b. Persentase Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat c. Persentase Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan yang Terjalin
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	a. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa b. Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan
2	Unsur Sekretariat DPRD	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
2	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase capaian dukungan fasilitasi sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap tugas dan fungsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
D	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	
1.	Unsur Perencanaan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
2	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Ketepatan waktu dalam tahapan pelaksanaan perencanaan (sesuai dengan Permendagri 86) Capaian Kinerja Perangkat Daerah
3	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase konsistensi program Rencana Kerja Pemerintah Daerah terhadap program Rencana Pembangunan Daerah b. Persentase konsistensi Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah
2	Unsur Keuangan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
2	Program pengelolaan keuangan daerah	a. Persentase dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tepat waktu b. Persentase dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah tepat waktu

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
		c. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan tepat waktu
3	Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan laporan aset sesuai dengan peraturan pengelolaan Barang Milik Daerah
4	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah
3	Unsur Kepegawaian	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
2	Program kepegawaian daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
4	Unsur Penelitian dan Pengembangan	
1	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan perencanaan pembangunan
E	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
1	Inspektorat Daerah	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
2	Program penyelenggaraan pengawasan	a. Persentase tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan b. Persentase tindak lanjut temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah c. Persentase pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan
3	Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase Organisasi Perangkat Daerah bernilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 3
F	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
1	Kecamatan Pariaman Utara	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
2	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan
3	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
4	Program penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum	Persentase peningkatan penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum
5	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi yang dilakukan untuk peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
6	Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan desa yang dilakukan
2 Kecamatan Pariaman Tengah		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah b. Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
2	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan
3	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik
4	Program penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum	Persentase peningkatan penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum
5	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi yang dilakukan untuk peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
6	Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan desa yang dilakukan
3 Kecamatan Pariaman Timur		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan
3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang difasilitasi
4	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
5	Program penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum	Persentase Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
6	Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan desa yang dilakukan
4 Kecamatan Pariaman Selatan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah
		Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
2	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang difasilitasi
3	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan
4	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan
5	Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan desa yang dilakukan
G URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah
		Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapatkan sosialisasi penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	a. Persentase partai politik yang aktif b. Persentase partisipasi pemilih
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat yang aktif

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase masyarakat yang mendapatkan sosialisasi Pencegahan , Pemberantasan , penyalahgunaan , dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkoba
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase pengendalian (deteksi dini) gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilaksanakan

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD